

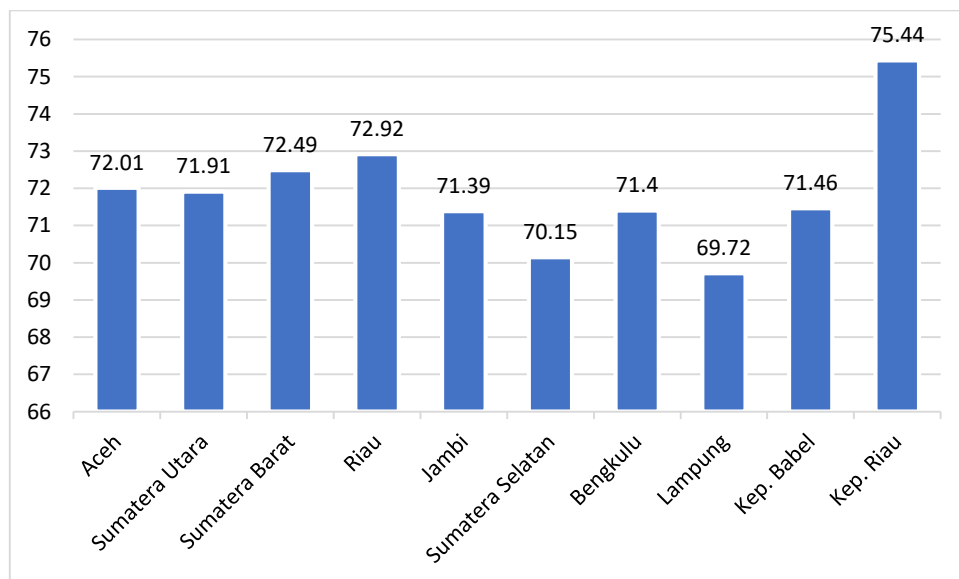
BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Upah Minimum Provinsi, dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi-Provinsi yang terletak di Pulau Sumatera pada tahun 2017-2023

5.1.1 Perkembangan Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera

Ketimpangan pendapatan adalah keadaan di mana distribusi pendapatan di suatu masyarakat tidak merata, sehingga ada perbedaan yang signifikan antara kelompok berpenghasilan tinggi dengan kelompok yang berpenghasilan rendah. Ketimpangan ini menggambarkan bagaimana kekayaan atau pendapatan tidak terbagi secara adil di antara individu atau rumah tangga pada suatu populasi.



Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2023), diolah

Gambar 4 Grafik Rata-Rata Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera

Sepanjang periode tahun 2017-2023 rata-rata ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera sebesar 0,318 secara umum berada pada kategori ketimpangan sedang, dengan indeks Gini di sebagian besar provinsi berkisar antara 0,30 hingga 0,37, dan terdapat empat provinsi yang memiliki nilai rata-rata gini ratio dibawah

nilai rata-rata gini ratio Pulau Sumatera, keempat provinsi tersebut yakni Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Kepulauan Bangka Belitung.

Meskipun terdapat variasi antar provinsi, sebagian besar wilayah menunjukkan ketimpangan yang tidak ekstrim. Provinsi kaya akan SDA dan industrialisasi yang lebih maju, seperti Riau dan Sumatera Utara, cenderung memiliki ketimpangan yang lebih tinggi karena disparitas antara pendapatan di sektor formal dan informal. Sementara itu, provinsi-provinsi agraris seperti Aceh, Bengkulu, dan Sumatera Barat umumnya menunjukkan ketimpangan yang lebih rendah, meskipun tetap berada dalam kategori sedang. Pandemi Covid-19 sempat memperburuk ketimpangan pada tahun 2020, namun seiring pemulihan ekonomi pada tahun 2021-2023, kondisi ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera secara keseluruhan tetap berada pada tingkat sedang.

Tabel 5.1 Kondisi Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
Aceh	0,329	0,318	0,321	0,319	0,323	0,291	0,296	0,314
Sumatera Utara	0,335	0,311	0,315	0,314	0,313	0,326	0,309	0,318
Sumatera Barat	0,312	0,305	0,307	0,301	0,3	0,292	0,28	0,300
Riau	0,325	0,347	0,331	0,321	0,327	0,323	0,324	0,328
Jambi	0,334	0,335	0,324	0,316	0,315	0,335	0,343	0,329
Sumatera Selatan	0,365	0,341	0,339	0,338	0,34	0,33	0,338	0,342
Bengkulu	0,349	0,355	0,329	0,323	0,321	0,315	0,333	0,332
Lampung	0,333	0,326	0,331	0,32	0,314	0,313	0,324	0,323
Kep. Babel	0,276	0,272	0,262	0,257	0,247	0,255	0,245	0,259
Kep. Riau	0,359	0,339	0,337	0,334	0,339	0,325	0,34	0,339
Rata-rata								0,318

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023), diolah

Nilai rata-rata gini ratio di Provinsi Aceh yaitu sebesar 0,314 yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah, namun PDRB per kapita di wilayah tersebut tidak mencerminkan hal yang serupa sehingga mengindikasikan bahwa pendapatan masyarakat Aceh tidak merata dan mungkin cenderung berada pada tingkat yang lebih rendah secara keseluruhan (Kemenkeu, 2024).

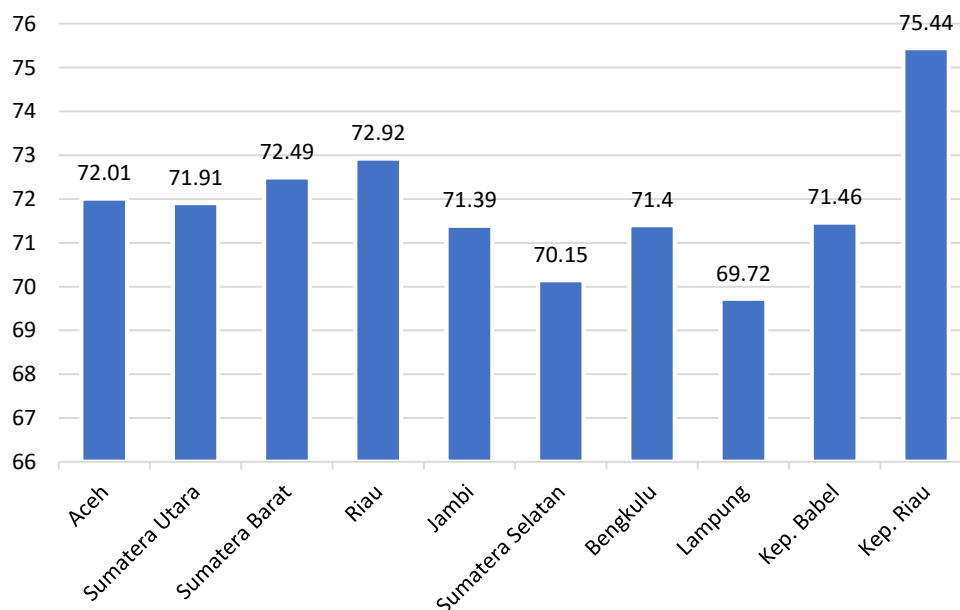
Nilai rata-rata gini ratio di Provinsi Sumatera Barat senilai 0,300 yang menunjukkan bahwa perekonomian Provinsi Sumatera Barat berkembang dengan adil di antara sektor-sektor yang berbeda, hal ini dapat menghasilkan pendapatan yang lebih merata di antara penduduknya. Nilai rata-rata gini ratio di Kepulauan Bangka Belitung senilai 0,259 yang mana salah satu alasan rendahnya Gini ratio di Kepulauan Bangka Belitung adalah peningkatan distribusi pendapatan di daerah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan di perkotaan semakin merata di antara kelompok penduduk, yang berdampak pada penurunan ketimpangan pendapatan. Di samping itu, di pedesaan juga terjadi peningkatan distribusi pengeluaran, menandakan bahwa pendapatan di daerah pedesaan juga semakin merata di kalangan kelompok terbawah, yang secara keseluruhan turut berkontribusi pada penurunan ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut (BPS, 2024).

Adapun tiga provinsi di Sumatera yang mempunyai nilai Gini ratio di atas rata-rata, yakni Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Riau. Nilai rata-rata gini ratio di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,342 dimana tingginya gini ratio di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum seutuhnya merata di setiap lapisan masyarakat provinsi tersebut, yang mencerminkan adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi juga termasuk salah satu penentu yang berkontribusi pada tingginya tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan. Nilai Gini ratio yang tinggi di Provinsi Bengkulu sebesar 0,332 sebagian besar disebabkan oleh tingkat pengangguran terbuka yang tinggi dan tingkat kemiskinan yang masih signifikan di wilayah tersebut, kedua faktor ini membawa dampak yang kuat pada ketimpangan pendapatan di provinsi tersebut (Kemenkeu, 2024). Angka gini ratio yang tinggi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,339 jika dibandingkan dengan rata-rata di Sumatera disebabkan oleh kurangnya efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut menandakan bahwa upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan belum memberikan dampak yang signifikan secara nyata di wilayah tersebut (Hartoto and As'ari, 2021). Jika melihat secara keseluruhan,

hanya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengalami penurunan nilai gini ratio setiap tahun dalam periode 2017-2023.

5.1.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera

Indeks Pembangunan Manusia termasuk salah satu penentu utama dalam mengevaluasi kualitas pembangunan di sebuah wilayah, terdiri dari tiga aspek utama: kesehatan (umur panjang serta kehidupan sehat), pendidikan (tingkat pengetahuan), serta standar hidup yang memadai (pendapatan). IPM biasanya dihitung dalam rentang angka antara 0 hingga 100, dengan semakin tinggi nilai yang tercatat, semakin baik pula kualitas hidup penduduk di wilayah tersebut. Berikut ini adalah gambaran mengenai perkembangan IPM di Pulau Sumatera selama periode 2017 hingga 2023.



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023), diolah

Gambar 5 Grafik Rata-Rata IPM di Pulau Sumatera

Kondisi Indeks Pembangunan Manusia pada 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera menunjukkan peningkatan yang bervariasi, meskipun masih ada kesenjangan di antara provinsi-provinsi tersebut. Secara umum, provinsi seperti Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Sumatera Utara memiliki IPM yang

lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya, berada dalam kategori tinggi (di atas 70). Provinsi Riau dan Kepulauan Riau misalnya, terus mengalami peningkatan berkat pertumbuhan ekonomi yang stabil serta kemajuan di sektor pendidikan dan kesehatan. Sumatera Barat dan Sumatera Utara juga menunjukkan peningkatan IPM yang konsisten, didorong oleh perbaikan akses pendidikan dan layanan kesehatan.

Di sisi lain, provinsi seperti Aceh, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Lampung masih berada pada kategori sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$), meskipun beberapa di antaranya mendekati kategori tinggi. Aceh misalnya, meski memiliki sumber daya alam yang melimpah, IPM nya masih berada di level sedang akibat tantangan dalam pemerataan akses pendidikan dan kesehatan di wilayah pedalaman. Sumatera Selatan, yang menjadi pusat industri dan sumber daya alam, juga menghadapi tantangan yang serupa, meskipun IPM nya perlahan meningkat menuju kategori tinggi. Jambi, Bengkulu, dan Lampung juga mengalami peningkatan IPM meski laju peningkatannya lebih lambat, terutama karena keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar di beberapa daerah.

Tabel 5.2 Kondisi Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
Aceh	70,6	71,19	71,9	71,99	72,18	72,8	73,4	72,01
Sumatera Utara	70,57	71,18	71,74	71,77	72	72,71	73,37	71,91
Sumatera Barat	71,24	71,73	72,39	72,38	72,65	73,26	73,75	72,49
Riau	71,79	72,44	73,00	72,71	72,94	73,52	74,04	72,92
Jambi	69,99	70,65	71,26	71,29	71,63	72,14	72,77	71,39
Sumatera Selatan	68,86	69,39	70,02	70,01	70,24	70,9	71,62	70,15
Bengkulu	69,95	70,64	71,21	71,4	71,64	72,16	72,78	71,40
Lampung	68,25	69,02	69,57	69,69	69,9	70,45	71,15	69,72
Kep. Babel	69,99	70,67	71,30	71,47	71,69	72,24	72,85	71,46
Kep. Riau	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79	76,46	77,11	75,44
Rata-rata								71,89

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023), diolah

Pada tabel 5.2 dapat dilihat bahwa kondisi Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera menunjukkan tren peningkatan di seluruh provinsi dari tahun 2017

hingga 2023, dengan rata-rata IPM regional mencapai 71,89 persen. Provinsi Kepulauan Riau memiliki IPM tertinggi di Pulau Sumatera selama periode tersebut, dengan rata-rata 75,44 persen, mencerminkan kinerja yang baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.

Provinsi Riau mengikuti dengan rata-rata IPM sebesar 72,92 persen, menunjukkan kemajuan yang stabil dalam pembangunan manusia. Provinsi Sumatera Barat dan Aceh juga mencatat IPM yang relatif tinggi, masing-masing dengan rata-rata 72,49 persen dan 72,01 persen, mencerminkan peningkatan berkelanjutan di sektor pendidikan dan kesehatan.

Provinsi seperti Jambi, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung berada di tingkat menengah dengan rata-rata IPM masing-masing 71,39 persen, 71,40 persen, dan 71,46 persen. Kemajuan di provinsi-provinsi ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup, meskipun masih berada di bawah beberapa provinsi teratas.

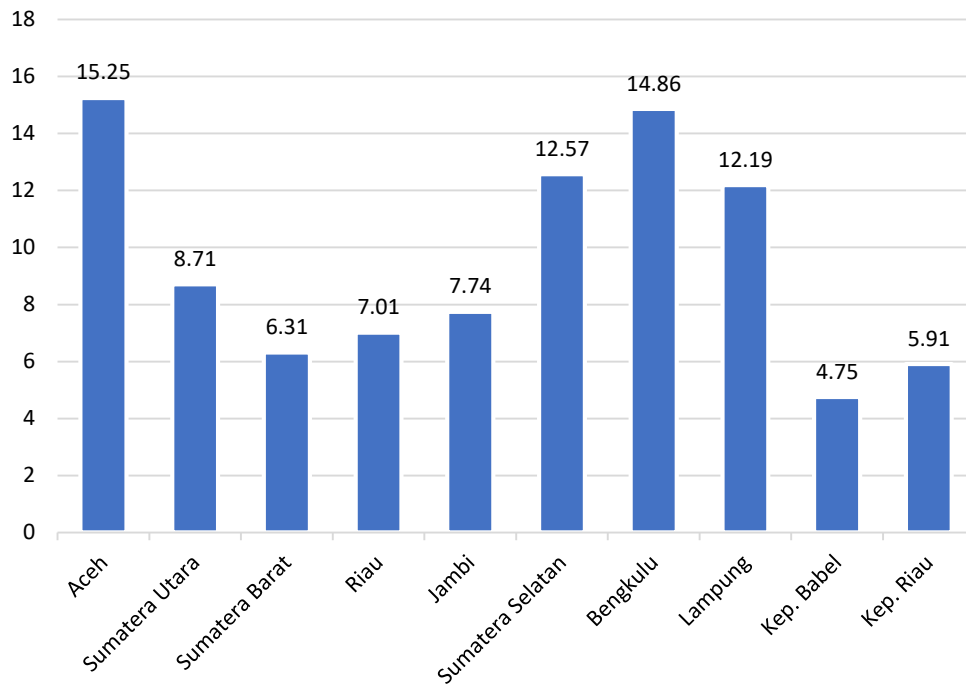
Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung mencatat IPM terendah di Pulau Sumatera, dengan rata-rata masing-masing sebesar 70,15 persen dan 69,72 persen. Meskipun demikian, kedua provinsi ini tetap menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, yang menunjukkan adanya upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, meski sebagian besar provinsi di Sumatera berada dalam kategori sedang, peningkatan IPM menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat, dengan prospek peningkatan lebih lanjut jika akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan terus diperluas dan ditingkatkan.

5.1.3 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Pulau Sumatera

Salah satu cara dalam mengevaluasi kemiskinan yakni melalui menghitung tingkat kemiskinan, yang menunjukkan persentase penduduk yang pengeluarannya ada di bawah garis kemiskinan. Indikator ini mengukur proporsi individu yang tidak kurang bisa mencukupi kebutuhan dasar mereka, sebagai contohnya pangan, pakaian, dan tempat tinggal, berdasarkan standar yang berlaku di wilayah tertentu. Semakin tinggi tingkat kemiskinan, kian banyak orang yang hidup di bawah garis

kemiskinan, yang mengindikasikan adanya ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat tersebut.



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023), diolah

Gambar 6 Grafik Rata-Rata Tingkat Kemiskinan di Pulau Sumatera

Melalui grafik dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat kemiskinan yang terjadi di Pulau Sumatera dari tahun 2017-2023 bersifat fluktuatif, yang ditentukan oleh beragam faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan pemerintah. Pada tahun 2017, tingkat kemiskinan di Sumatera cenderung turun sejalan dengan pertumbuhan perekonomian yang stabil dan program-program bantuan sosial yang efektif. Meskipun demikian, pada tahun 2020, pandemi Covid-19 membawa dampak besar terhadap ekonomi regional, menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di beberapa provinsi di Sumatera, terutama karena hilangnya lapangan kerja dan penurunan pendapatan. Meskipun demikian, pemerintah berupaya mengatasi dampak tersebut melalui berbagai bantuan sosial dan pemulihan ekonomi. Setelah 2021, beberapa daerah mulai menunjukkan perbaikan, dan tingkat kemiskinan menurun secara bertahap seiring dengan pemulihan ekonomi, meski belum kembali

ke kondisi pra-pandemi. Hingga tahun 2023, tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera cenderung turun, tetapi masih terdapat disparitas antarprovinsi, dengan beberapa daerah yang memiliki angka kemiskinan lebih tinggi akibat ketergantungan pada sektor-sektor yang pulih lebih lambat.

Tabel 5.3 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Pulau Sumatera

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
Aceh	15,92	15,68	15,01	15,43	15,53	14,75	14,45	15,25
Sumatera Utara	9,28	8,94	8,63	9,14	8,49	8,33	8,15	8,71
Sumatera Barat	6,75	6,55	6,29	6,56	6,04	6,04	5,95	6,31
Riau	7,41	7,21	6,9	7,04	7,00	6,84	6,68	7,01
Jambi	7,90	7,85	7,51	7,97	7,67	7,70	7,58	7,74
Sumatera Selatan	13,1	12,82	12,56	12,98	12,79	11,95	11,78	12,57
Bengkulu	15,59	15,41	14,91	15,3	14,43	14,34	14,04	14,86
Lampung	13,04	13,01	12,3	12,76	11,67	11,44	11,11	12,19
Kep. Babel	5,30	4,77	4,5	4,89	4,67	4,61	4,52	4,75
Kep. Riau	6,13	5,83	5,8	6,13	5,75	6,03	5,69	5,91
Rata-rata								9,53

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2023), diolah

Tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera bervariasi di setiap provinsi, dengan rata-rata keseluruhan sebesar 9,53 persen dari tahun 2017 hingga 2023. Provinsi Aceh mencatat tingkat kemiskinan tertinggi, dengan rata-rata 15,25 persen selama periode tersebut. Meskipun terjadi penurunan dari 15,92 persen pada tahun 2017 menjadi 14,45 persen pada tahun 2023, Aceh masih menghadapi tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan.

Provinsi Bengkulu menyusul dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 14,86 persen, diikuti oleh Sumatera Selatan dan Lampung dengan rata-rata masing-masing 12,57 persen dan 12,19 persen. Provinsi-provinsi ini menunjukkan tren penurunan kemiskinan, meskipun angka kemiskinannya masih tergolong tinggi dibandingkan provinsi lain di Sumatera.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat kemiskinan terendah di Pulau Sumatera, dengan rata-rata hanya 4,75 persen. Provinsi ini secara konsisten mencatat angka kemiskinan di bawah 5 persen selama periode 2017–2023, menandakan keberhasilan dalam menekan angka kemiskinan. Kepulauan Riau juga mencatat angka kemiskinan yang relatif rendah dengan rata-rata 5,91 persen.

Sumatera Barat, Riau, dan Jambi memiliki tingkat kemiskinan yang lebih moderat dibandingkan provinsi lainnya, dengan rata-rata masing-masing sebesar 6,31 persen, 7,01 persen, dan 7,74 persen. Sementara itu, Sumatera Utara mencatat tingkat kemiskinan sebesar 8,71 persen, dengan tren penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Secara keseluruhan, meskipun ada perbaikan dalam pengurangan kemiskinan di Pulau Sumatera, perbedaan tingkat kemiskinan antarprovinsi mencerminkan perlunya strategi pembangunan yang lebih spesifik dan berbasis kebutuhan lokal. Hal ini terutama penting bagi provinsi seperti Aceh dan Bengkulu yang masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi.

5.1.4 Perkembangan Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera

Upah Minimum Provinsi adalah salah satu parameter penting dalam evaluasi pembangunan ekonomi. UMP mencerminkan tingkat upah terendah yang ditetapkan oleh gubernur untuk wilayah provinsi tertentu. Tujuan utama dari penetapan UMP yakni guna melindungi pekerja dari upah yang terlalu rendah dan memastikan mereka menerima penghasilan yang cukup guna mencukupi kebutuhan hidup yang layak. Berikut adalah data UMP di Pulau Sumatera untuk periode 2017-2023.

Perkembangan UMP di Pulau Sumatera pada kurun waktu 7 tahun terakhir terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kenaikan UMP bervariasi antar provinsi dari tahun 2017-2023, provinsi dengan kenaikan rata-rata UMP tertinggi berada di Provinsi Jambi sebanyak 6,2%, diikuti oleh provinsi Sumatera Selatan sebesar 6,1%, dan Provinsi Bengkulu sebesar 6%.

Pada tahun 2018 - 2020, UMP di Pulau Sumatera naik yang cukup stabil, dengan rata-rata kenaikan diatas 8%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi di Pulau Sumatera pada periode tersebut cukup baik. Meskipun demikian, pada tahun 2020, terjadi stagnasi UMP di beberapa provinsi akibat pandemi Covid-19. Hal ini memperlihatkan bahwasanya pandemi Covid-19 berdampak signifikan di sektor ekonomi di Pulau Sumatera. Pada tahun 2021-2023, UMP di Pulau Sumatera

kembali mengalami kenaikan, meskipun tidak setinggi tahun 2017-2019. Hal tersebut memperlihatkan bahwasanya pemulihan ekonomi di Pulau Sumatera mulai terjadi pasca pandemi Covid-19. Perkembangan Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera Periode 2017-2023 dapat diamati pada tabel berikut

Tabel 5.4 Perkembangan Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
Aceh	2.500.000	2.700.700	2.916.810	3.165.030	3.165.030	3.166.460	3.413.666	5,40%
Perkembangan (%)	-	8,00%	8,00%	8,50%	0,00%	0,00%	7,80%	
Sumatera Utara	1961354	2.132.188	2.303.403	2.499.422	2.499.422	2.522.609	2.710.493	5,60%
Perkembangan (%)	-	8,70%	8,00%	8,50%	0,00%	0,90%	7,40%	
Sumatera Barat	1.949.284	2.119.067	2.289.228	2.484.041	2.484.041	2.512.539	2.742.467	5,90%
Perkembangan (%)	-	8,70%	8,00%	8,50%	0,00%	1,10%	9,20%	
Riau	2.266.722	2.464.154	2.662.025	2.888.563	2.888.563	2.938.564	3.191.662	5,90%
Perkembangan (%)	-	8,70%	8,00%	8,50%	0,00%	1,70%	8,60%	
Jambi	2.063.000	2.243.718	2.423.889	2.630.161	2.630.161	2.698.940	2.943.033	6,20%
Perkembangan (%)	-	8,80%	8,00%	8,50%	0,00%	2,60%	9,00%	
Sumatera Selatan	2.388.000	2.595.995	2.804.453	3.043.111	3.043.111	3.144.446	3.404.177	6,10%
Perkembangan (%)	-	8,70%	8,00%	8,50%	0,00%	3,30%	8,30%	
Bengkulu	1.730.000	1.888.741	2.040.000	2.213.604	2.213.604	2.238.094	2.418.280	6%
Perkembangan (%)	-	9%	8%	9%	0%	1%	8%	
Lampung	1.908.447	2.074.673	2.240.646	2.431.324	2.431.324	2.440.486	2.633.284	5,60%
Perkembangan (%)	-	8,70%	8,00%	8,50%	0,00%	0,40%	7,90%	
Kep.Babel	2.534.673	2.755.443	2.976.705	3.230.022	3.230.022	3.264.884	3.498.479	5,60%
Perkembangan (%)	-	8,70%	8,00%	8,50%	0,00%	1,10%	7,20%	
Kep. Riau	2.358.454	2.563.875	2.769.754	3.005.383	3.005.383	3.050.172	3.279.194	5,70%
Perkembangan (%)	-	8,70%	8,00%	8,50%	0,00%	1,50%	7,50%	

Sumber: (KEMNAKER, 2023), diolah

5.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, dan Upah Minimum Provinsi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera pada tahun 2017-2023

5.2.1 Uji Penentuan Model

A. Uji Chow

Pada analisis regresi data panel, Uji Chow digunakan dalam memilih model yang paling tepat antara CEM dan FEM. Hal ini dilakukan dengan membandingkan kedua model berdasarkan nilai probabilitas f-statistik. Apabila nilai probabilitas F melebihi 5%, maka *Common Effect Model* dianggap lebih sesuai. Meskipun demikian, apabila nilai probabilitas F di bawah 5%, maka model FEM yang disarankan.

Tabel 5.5 Hasil Uji Chow (Likelihood Ratio)

Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	36.396285	(9,57)	0,0000
Cross-section Chi-square	133.634594	9	0,0000

Sumber: Data diolah, 2024

Temuan analisis statistik menggunakan Uji Chow dan Redundant Test memperlihatkan nilai probabilitas chi-square sebesar 0,0000, di bawah nilai alpha yang ditetapkan sebesar 0,05. Hal tersebut menyebabkan hipotesis alternatif H_a diterima, mengindikasikan model yang sesuai adalah *Fixed Effect Model*. Langkah berikutnya ialah menetapkan model yang lebih sesuai antara FEM atau REM, yang akan dibandingkan melalui Uji Hausman.

B. Uji Hausman

Untuk menentukan model yang tepat antara FEM dan REM, Uji Hausman dipilih. Uji ini bertujuan untuk memutuskan model yang lebih sesuai, apakah FEM atau REM. Keputusan pemilihan model ditentukan berdasarkan nilai probabilitas F-statistik. Jika nilai probabilitas F-statistik melebihi 5%, alhasil model REM disarankan. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas F-statistik kurang dari 5%, model FEM dianggap lebih tepat untuk digunakan.

Tabel 5.6 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.013843	3	0.5695

Sumber: Data diolah, 2024

Menurut hasil pengujian yang dilakukan, nilai probabilitas chi-square yang diperoleh sebesar 0,5695, melebihi 0,05 ($0,5695 > 0,05$). Hal tersebut menandakan bahwasanya model yang paling cocok untuk digunakan yakni *Random Effect Model* (REM). Karena ditemui adanya perbedaan model yang digunakan pada uji Chow dan uji Hausman, langkah berikutnya adalah melakukan uji Langrange Multiplier untuk memastikan model yang lebih tepat.

C. Uji Lagrange Multiplier (Uji LM)

Test Lagrange Multiplier (LM) digunakan dalam menetapkan model mana yang lebih sesuai antara REM atau CEM. Uji ini dibuat oleh Breusch-Pagan dan dipergunakan dalam menguji signifikansi model REM serta membantu pada pemilihan model yang lebih sesuai dengan data saat ini.

Tabel 5.7 Hasil Uji LM

	Cross section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	132.2528 (0.0000)	1.40328 (0.2362)	133.656 (0.0000)

Sumber: Data diolah, 2024

Menurut hasil uji diatas, diketahui nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0,05$ maka model ini tepat menggunakan *Random Effect Model* (REM).

5.2.2 Hasil Penelitian Model Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil dari uji spesifikasi model yang telah dilakukan melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier, penelitian ini tepat menggunakan *Random Effect Model*, karena menunjukkan nilai probabilitas yang lebih signifikan dibandingkan dengan model lainnya. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil analisis data panel menggunakan model REM, jumlah observasi

mencakup sepuluh provinsi yang ada di Pulau Sumatera selama periode 2017 hingga 2023 (7 tahun).

Tabel 5.8 Hasil Estimasi Regresi Data Panel Dengan Metode REM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.076876	0.227225	0.338326	0.7362
IPM	0.003923	0.003321	1.181519	0.2416
TK	0.004123	0.002001	2.060279	0.0433
UMP	-3.04E-08	9.38E-09	-3.242666	0.0019
Random Effects (Cross)				
Aceh—C	-0.016676			
Bengkulu—C	-0.021595			
Jambi—C	0.016314			
Kepbabel—C	-0.023782			
Kepriau—C	0.027409			
Lampung—C	-0.007266			
Riau—C	0.019921			
Sumaterabarat—C	-0.015326			
Sumateraselatan—C	0.025932			
Sumaterautara—C	-0.004931			
R-squared		0.406161		
F-statistic		15.04706		
Prob(F-statistic)		0.000000		

Sumber: Data diolah, 2024

Didasarkan atas hasil estimasi REM, berikut ini model persamaan yang dapat dibentuk:

$$KP = \beta_0 + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 TK_{it} + \beta_3 UMP_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$KP = 0.076876 + 0.003923IPM_{it} + 0.004123TK_{it} - 3.04E-08UMP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

KP_{it} = Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)

IPM_{it} = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

TK_{it} = Tingkat Kemiskinan

UMP_{it} = Upah Minimum Provinsi (UMP)

β_0 = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien bebas

i = Cross section (10 Provinsi yang ada di pulau Sumatera)

t = Tahun (Time series, 2017-2023)

ε = Error

Nilai konstanta sebesar 0.07687. Artinya apabila selama periode 2017-2023 seluruh variabel independen, yakni indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, dan upah minimum provinsi bersifat konstan atau tetap maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di Pulau Sumatera selama periode penelitian adalah sebesar 0,07687

- a. Jika indeks pembangunan manusia naik sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.003923, dengan asumsi variabel tingkat kemiskinan, dan upah minimum provinsi tetap.
- b. Jika tingkat kemiskinan naik sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.004123, dengan asumsi variabel indeks pembangunan manusia, dan upah minimum provinsi tetap.
- c. Jika upah minimum provinsi naik sebesar 1 persen, maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.0000000304, dengan asumsi variabel indeks pembangunan manusia, dan tingkat kemiskinan tetap.

Persamaan regresi antar cross section:

1. Provinsi Aceh

$$\text{Ketimpangan pendapatan Aceh} = -0.016676 + 0.076876 + 0.003923IPM_{it} + 0.004123TK_{it} - 3.04E-08UMP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Konstanta 0,0602 menunjukkan bahwa apabila indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, beserta upah minimum provinsi nilainya sama dengan nol, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Aceh yakni sebesar 0,0602

2. Provinsi Sumatera Utara

$$\text{Ketimpangan pendapatan Sumatera Utara} = -0.004931 + 0.076876 + 0.003923IPM_{it} + 0.004123TK_{it} - 3.04E-08UMP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Konstanta 0,071945 menunjukkan bahwa apabila indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, dan upah minimum provinsi nilainya sama dengan nol, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara yakni sebesar 0,071945

3. Provinsi Sumatera Barat

$$\text{Ketimpangan pendapatan Sumatera Barat} = -0.015326 + 0.076876 + 0.003923IPM_{it} + 0.004123TK_{it} - 3.04E-08UMP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Konstanta 0.06155 menunjukkan bahwa apabila indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, beserta upah minimum provinsi nilainya sama dengan nol, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat yakni sebesar 0,06155

4. Provinsi Riau

$$\text{Ketimpangan pendapatan Riau} = 0.019921 + 0.076876 + 0.003923IPM_{it} + 0.004123TK_{it} - 3.04E-08UMP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Konstanta 0,096797 menunjukkan bahwa apabila indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, dan upah minimum provinsi nilainya sama dengan nol, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Riau yakni sebesar 0,096797

5. Provinsi Jambi

$$\text{Ketimpangan pendapatan Jambi} = 0.016314 + 0.076876 + 0.003923IPM_{it} + 0.004123TK_{it} - 3.04E-08UMP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Konstanta 0.09319 menunjukkan bahwa apabila indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, dan upah minimum provinsi nilainya sama dengan nol, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Jambi yakni sebesar 0,09319

6. Provinsi Sumatera Selatan

$$\text{Ketimpangan Pendapatan Sumatera Selatan} = 0.025932 + 0.076876 + 0.003923IPM_{it} + 0.004123TK_{it} - 3.04E-08UMP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Konstanta 0,102808 menunjukkan bahwa apabila indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, dan upah minimum provinsi nilainya sama dengan nol, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan yakni sebesar 0,102808

7. Provinsi Lampung

$$\text{Ketimpangan Pendapatan Lampung} = -0.007266 + 0.076876 + 0.003923IPM_{it} + 0.004123TK_{it} - 3.04E-08UMP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Konstanta 0,06961 menunjukkan bahwa apabila indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, dan upah minimum provinsi nilainya sama dengan nol, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Lampung yakni sebesar 0,06961

8. Provinsi Bengkulu

$$\text{Ketimpangan Pendapatan Bengkulu} = -0.021595 + 0.076876 + 0.003923IPM_{it} + 0.004123TK_{it} - 3.04E-08UMP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Konstanta 0,055281 menunjukkan bahwa apabila indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, dan upah minimum provinsi nilainya sama dengan nol, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Bengkulu yakni sebesar 0,055281

9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

$$\text{Ketimpangan Pendapatan Bangka Belitung} = -0.023782 + 0.076876 + 0.003923IPM_{it} + 0.004123TK_{it} - 3.04E-08UMP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Konstanta 0.053094 menunjukkan bahwa apabila indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, dan upah minimum provinsi nilainya sama dengan nol, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung yakni sebesar 0,053094

10. Provinsi Kepulauan Riau

$$\text{Ketimpangan pendapatan Kepulauan Riau} = 0.027409 + 0.076876 + 0.003923IPM_{it} + 0.004123TK_{it} - 3.04E-08UMP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Konstanta 0,104285 menunjukkan bahwa apabila indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, dan upah minimum provinsi nilainya sama dengan nol, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau yakni sebesar 0,104285

Provinsi Kepulauan Riau memiliki ketimpangan pendapatan tertinggi dengan nilai konstanta sebesar 0,104285. Tingginya ketimpangan ini disebabkan oleh struktur ekonomi yang berorientasi pada sektor minyak, gas, dan industri, yang terpusat di kawasan tertentu. Daerah lainnya belum mendapatkan manfaat pembangunan yang merata, diperparah dengan urbanisasi tinggi dan konsentrasi lapangan kerja di wilayah perkotaan.

Di posisi kedua, Provinsi Sumatera Selatan mencatat ketimpangan pendapatan sebesar 0,102808. Ketimpangan ini disebabkan oleh ketergantungan pada sektor perkebunan besar, seperti karet dan kelapa sawit, yang memberikan keuntungan besar bagi segelintir pelaku usaha. Sementara itu, masyarakat lokal banyak bergantung pada sektor informal dengan tingkat pendapatan yang rendah.

Provinsi Jambi menempati posisi ketiga dengan ketimpangan pendapatan sebesar 0,09319. Penyebab utama ketimpangan ini adalah dominasi sektor perkebunan kelapa sawit dan karet, yang lebih menguntungkan pengusaha besar. Petani kecil sering menghadapi fluktuasi harga komoditas dan keterbatasan akses terhadap pasar maupun teknologi.

Provinsi Riau mencatat ketimpangan pendapatan sebesar 0,096797, serupa dengan Jambi. Ketimpangan ini dipicu oleh dominasi sektor minyak, gas, dan perkebunan sawit yang cenderung mengonsentrasikan kekayaan pada segelintir pihak, sementara sebagian besar masyarakat belum mendapatkan dampak ekonomi yang signifikan.

Provinsi Sumatera Utara berada di peringkat kelima dengan ketimpangan pendapatan sebesar 0,071945. Penyebabnya adalah kesenjangan antara wilayah perkotaan seperti Medan yang lebih maju dibandingkan pedesaan. Sektor manufaktur dan jasa cenderung terpusat di perkotaan, meninggalkan daerah pinggiran dengan akses terbatas terhadap ekonomi modern.

Provinsi Lampung memiliki ketimpangan pendapatan sebesar 0,06961. Hal ini dipengaruhi oleh dominasi sektor pertanian subsisten dan terbatasnya pengembangan sektor industri yang dapat menyerap tenaga kerja dengan upah layak. Ketimpangan antarwilayah juga cukup signifikan di provinsi ini.

Provinsi Aceh mencatat ketimpangan pendapatan sebesar 0,0602. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang besar, dampak konflik masa lalu serta proses rekonstruksi dan rehabilitasi pascatsunami belum sepenuhnya merata. Hal ini membuat ketimpangan pendapatan masih menjadi persoalan.

Provinsi Sumatera Barat memiliki ketimpangan pendapatan sebesar 0,06155. Salah satu penyebabnya adalah terbatasnya akses masyarakat pedesaan terhadap layanan publik dan infrastruktur ekonomi. Namun, budaya merantau yang kuat turut membantu mengurangi tekanan ekonomi pada wilayah ini.

Provinsi Bengkulu mencatat ketimpangan pendapatan sebesar 0,055281. Ketimpangan ini lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya, meskipun masih terdapat masalah dalam pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal dan tingginya ketergantungan pada sektor pertanian tradisional.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki ketimpangan pendapatan terendah dengan nilai konstanta 0,053094. Relatif rendahnya ketimpangan ini disebabkan oleh distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata. Meskipun demikian, tantangan diversifikasi ekonomi dari sektor pertambangan timah tetap menjadi perhatian.

Secara keseluruhan, ketimpangan di setiap provinsi dipengaruhi oleh perbedaan struktur ekonomi, konsentrasi sektor unggulan, urbanisasi, serta akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang tidak merata. Solusi yang diperlukan meliputi diversifikasi ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan layanan publik, serta penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

5.2.2 Uji Parameter Regresi Data Panel

A. Uji F (overall)

Uji F digunakan dalam mengevaluasi apakah semua variabel independent (indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, dan upah minimum provinsi) berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (ketimpangan pendapatan). Pada penelitian ini, nilai F-statistik sebesar 15,04706 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000000. Berdasarkan $\alpha = 0,05$ dan perhitungan derajat kebebasan ($df1 = k-1$, $df2 = n-k$), didapatkan nilai f tabel sebesar 3,13 pada signifikansi 0,05. Karena nilai F hitung (15,04706) lebih besar daripada nilai f tabel (3,13) serta signifikansi 0,000000 di bawah 0,05, maka H_0 ditolak. Hal tersebut memperlihatkan bahwasanya variabel IPM, Tingkat Kemiskinan, beserta Upah Minimum Provinsi secara signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan di sepuluh provinsi di Pulau Sumatera.

B. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel independen (indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, dan upah minimum provinsi) terhadap variabel dependen (ketimpangan pendapatan). Berdasarkan analisis regresi random effect model pada tabel 5.8, maka diperoleh hasil uji t sebagai berikut:

Tabel 5.9 Hasil uji t

Variable	koefisien regresi	t-Statistic	Prob.	Keterangan
IPM?	0.003923	1.181519	0.2416	Tidak signifikan
TK?	0.004123	2.060279	0.0433	Signifikan
UMP?	-3.04E-08	-3.242666	0.0019	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2024

1. Pengaruh IPM terhadap ketimpangan pendapatan

Nilai t-statistik indeks pembangunan manusia adalah 1.181519 sedangkan nilai probabilitasnya sebesar 0,2416 dimana nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 artinya secara statistik menunjukkan bahwa variabel IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan memiliki pengaruh positif.

2. Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan

Nilai t-statistik tingkat kemiskinan adalah 2.060279 sedangkan nilai probabilitasnya sebesar 0.0433 artinya secara statistik menunjukkan bahwa variabel tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan memiliki pengaruh positif.

3. Pengaruh UMP terhadap ketimpangan pendapatan

Nilai t-statistik upah minimum provinsi adalah -3.242666 sedangkan nilai probabilitasnya sebesar 0.0019 artinya secara statistik menunjukkan bahwa variabel upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan memiliki pengaruh negatif.

C. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase dari keseluruhan variasi pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Berdasarkan analisis regresi dengan model REM, diperoleh nilai R-Squared sebagai berikut:

Tabel 5.10 Hasil Uji R-Squared

Variabel	R-squared
IPM	0,406161
TK	
UMP	

Sumber: Data diolah, 2024

Melalui tabel tersebut, hasil R^2 menunjukkan nilai sebesar 0,406161 yang menandakan bahwasanya variabel IPM, tingkat kemiskinan dan UMP berpengaruh sebesar 40,61% terhadap ketimpangan pendapatan di sepuluh provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Sementara itu sisanya 59,39% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

5.2.3 Uji Asumsi Klasik

A. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan guna mendeteksi apakah ditemukan hubungan kaitan yang signifikan antara dua ataupun lebih variabel independen pada model regresi. Dalam mengetahui ditemukannya multikolinearitas, dijalankan uji korelasi parsial antara variabel-variabel independen. Jika ada koefisien korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel tersebut, maka data dapat dianggap mengalami multikolinearitas. Dalam pendekatan regresi yang ideal, diharapkan tidak ada multikolinearitas yang kuat antara variabel independen dan variabel dependen.

Tabel 5.11 Hasil uji multikolinieritas

	IPM	TK	UMP
IPM	1. 000000	-0.477369	0.455607
TK	-0.477369	1. 000000	-0.220422
UMP	0.455607	-0.220422	1. 000000

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil uji korelasi parsial antar variabel independen menunjukkan bahwa penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas, dikarenakan tidak ada koefisien korelasi yang melebihi 0,80. Apabila terdapat koefisien korelasi yang lebih tinggi dari angka tersebut, maka hal ini akan menandakan adanya multikolinearitas pada model regresi yang digunakan.

B. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bermaksud guna menemukan apakah terdapat ketidaksamaan pada varian residual antar pengamatan dalam suatu model. Salah satu metode yang digunakan untuk mengujinya yakni uji Park. Apabila nilai

probabilitas yang dihasilkan di bawah 0,05, dapat disimpulkan ditemukan masalah heteroskedastisitas pada model tersebut. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas melebihi 0,05, maka tidak ditemukan persoalan heteroskedastisitas.

Tabel 5. 12 Hasil uji heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.001608	0.09967	0.01614	0.9872
IPM	-3.10E-05	0.00146	-0.0212	0.9831
TK	-0.00038	0.00068	-0.5527	0.5823
UMP	8.13E-09	4.68E-09	1.7383	0.0868

Sumber: Data diolah, 2024

Pada Tabel 5.12 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas semua variabel independen IPM (X_1), Tingkat Kemiskinan (X_2) dan Upah Minimum Provinsi (X_3) lebih besar dari pada 0,05. Oleh karena itu, bisa disimpulkan secara umum variabel-variabel independen pada model regresi ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

5.2.4 Pembahasan dan Interpretasi Hasil

Berdasarkan analisis data panel dengan model terpilih *Random Effect Model*, penelitian ini menyajikan pembahasan mengenai pengaruh variabel-variabel independen, seperti Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, beserta Upah Minimum Provinsi, pada ketimpangan pendapatan di sepuluh provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Berikut adalah hasil interpretasi dari pengolahan data tersebut:

A. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, variabel Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan adanya hubungan positif namun tidak berpengaruh secara signifikan pada tingkat kepercayaan 5% terhadap ketimpangan pendapatan di sepuluh provinsi yang ada di Pulau Sumatera pada periode tahun 2017-2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia berpotensi memengaruhi ketimpangan pendapatan,

dampaknya tidak cukup signifikan. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tercermin melalui IPM dapat meningkatkan kesehatan dan pendidikan, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan produktivitas. Hal ini dapat mempengaruhi perbaikan pendapatan, yang cenderung menurunkan ketimpangan pendapatan. Namun, laju peningkatan IPM di Sumatera relatif lebih lambat dibandingkan dengan provinsi di Pulau Jawa atau Bali, yang memiliki akses lebih baik terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Hasil ini bertentangan dengan hipotesis awal yang mengasumsikan adanya hubungan positif dan signifikan antara IPM dan ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Febriyani dan Ali Anis (2021), yang juga menemukan pengaruh positif namun tidak signifikan antara IPM dan ketimpangan distribusi pendapatan. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Muhammad Arif dan Rossy Agustin Wicaksani (2017) yang menyatakan bahwa IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

B. Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Menurut hasil analisis data diperoleh hasil tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan pada derajat kepercayaan 5% terhadap variabel ketimpangan pendapatan di 10 Provinsi yang ada di pulau Sumatera periode tahun 2017-2023.

Ketika kemiskinan meningkat, semakin banyak orang yang berada di bawah garis kemiskinan, mereka yang berada di garis kemiskinan memiliki pendapatan yang sangat rendah atau bahkan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sementara itu, kelompok kaya atau berpenghasilan tinggi cenderung mempertahankan atau bahkan meningkatkan kekayaannya, sehingga memperlebar jurang pendapatan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam situasi ini, distribusi pendapatan menjadi semakin tidak merata, di mana sebagian besar kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, sementara kelompok masyarakat miskin tetap terperangkap dalam kemiskinan.

Ketimpangan pendapatan yang tinggi ini sering kali memperkuat siklus kemiskinan, karena akses atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang lebih baik

menjadi lebih sulit bagi kelompok miskin, sehingga mereka tidak mampu memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Akibatnya, ketimpangan pendapatan terus meningkat seiring dengan tingginya tingkat kemiskinan. Penelitian ini sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Hindun, Ady Soejoto dan Hariyati (2019), yang menemukan bahwasanya kemiskinan membawa dampak signifikan secara parsial pada kemiskinan.

C. Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Upah Minimum Provinsi menunjukkan hubungan negatif dan signifikan pada derajat kepercayaan 5%. Dengan nilai koefisien sebesar 0.0000000304 persen. Artinya jika UMP naik sebesar 1 persen akan menyebabkan penurunan ketimpangan pendapatan sebesar 0.0000000304 persen. Koefisien yang sangat kecil menunjukkan bahwa meskipun ada hubungan yang signifikan secara statistik, dampaknya pada ketimpangan pendapatan relatif kecil dalam skala besar. Temuan dari penelitian ini searah dengan hipotesis, maka hipotesis diterima.

Penelitian ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Razi Rahman dan Dewi Zaini Putri (2021), yang memperlihatkan bahwasanya upah minimum berpengaruh negatif serta signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dengan kata lain, kenaikan upah minimum nantinya menyebabkan penurunan ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera.

5.2.5 Implikasi Kebijakan

Implikasi kebijakan dari penelitian ini sangat penting untuk mengatasi ketimpangan pendapatan yang masih menjadi permasalahan utama di Pulau Sumatera. Dengan menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, dan upah minimum provinsi terhadap ketimpangan pendapatan, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu meratakan distribusi pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Temuan-temuan yang diperoleh akan memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan yang lebih terarah dan tepat dapat diterapkan untuk menciptakan

pembangunan yang inklusif dan mengurangi kesenjangan antar wilayah di Pulau Sumatera.

1. Implikasi Kebijakan Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil analisis, kebijakan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera perlu diarahkan pada penguatan Indeks Pembangunan Manusia, penurunan tingkat kemiskinan, dan penyesuaian upah minimum provinsi yang lebih adil.

Pemerintah dapat memperkuat program pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di daerah dengan IPM yang masih rendah. Selain itu, pengentasan kemiskinan dapat difokuskan pada perluasan program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi lokal, dan akses terhadap layanan kesehatan serta pendidikan yang lebih merata. Kebijakan terkait upah minimum provinsi perlu dirumuskan berdasarkan analisis yang komprehensif terhadap kebutuhan hidup layak dan disparitas antarwilayah, sehingga mampu memberikan insentif yang lebih baik bagi pekerja sekaligus menjaga daya saing sektor usaha.

Implementasi program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Dana Desa juga dapat dioptimalkan untuk mempersempit kesenjangan pendapatan dengan melibatkan lebih banyak pihak lokal dalam pelaksanaannya. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta sangat diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Sumatera.

2. Implikasi Kebijakan Indeks Pembangunan

Temuan dari penelitian memperlihatkan bahwasanya Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera memiliki beberapa implikasi kebijakan penting yang perlu dipertimbangkan. Meskipun peningkatan IPM diharapkan membantu mengurangi ketimpangan pendapatan, fakta bahwa pengaruhnya tidak signifikan menandakan bahwa perbaikan dalam IPM saja tidak cukup untuk secara langsung mengatasi ketimpangan.

Sebagai rekomendasi kebijakan, pemerintah perlu fokus pada pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan di seluruh wilayah Sumatera, terutama di daerah yang tertinggal. Program-program yang mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, seperti pelatihan keterampilan dan dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perlu diperluas untuk meningkatkan daya saing masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang merata juga harus menjadi prioritas untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Beberapa contoh penerapan kebijakan yang dapat dioptimalkan adalah Program Indonesia Pintar (PIP) dan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang fokus pada akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu, bisa menjadi langkah yang efektif dalam meningkatkan IPM dan mengurangi ketimpangan pendapatan di tingkat regional, serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memberikan akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Program Desa Mandiri yang fokus pada pemberdayaan ekonomi di desa-desa juga dapat menjadi langkah efektif untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah.

3. Implikasi Kebijakan Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan di suatu daerah, maka semakin besar pula ketimpangan pendapatan yang terjadi. Penyebab utama dari hubungan ini adalah karena masyarakat yang hidup dalam kemiskinan cenderung memiliki akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas, kesehatan, serta lapangan pekerjaan yang layak. Akibatnya, mereka terperangkap dalam lingkaran kemiskinan dan sulit untuk meningkatkan pendapatan mereka, sehingga gap antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah semakin lebar. Selain itu, rendahnya daya beli masyarakat miskin juga mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat memperburuk ketimpangan pendapatan.

Sebagai rekomendasi kebijakan, pemerintah perlu fokus pada penanggulangan kemiskinan melalui program-program yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, seperti pendidikan yang terjangkau dan

berkualitas, akses kesehatan yang merata, serta pemberdayaan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Pemerintah juga harus memperkuat program bantuan sosial yang tepat sasaran serta memperluas peluang kerja berkualitas di sektor-sektor produktif, seperti pertanian modern dan industri, yang dapat menyerap tenaga kerja dari kelompok masyarakat miskin. Pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal juga harus dipercepat untuk membuka akses ekonomi dan meningkatkan mobilitas tenaga kerja di wilayah-wilayah yang masih tertinggal. Di samping itu, kebijakan redistribusi pendapatan melalui pajak progresif dan kenaikan upah minimum perlu diterapkan untuk mengurangi ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin. Dengan kebijakan yang lebih terfokus pada pengurangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan, diharapkan ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera dapat ditekan secara signifikan.

Beberapa contoh kebijakan yang telah diterapkan dan bisa diperkuat adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin, dan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang menyediakan bantuan pangan untuk keluarga kurang mampu. Program-program tersebut dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin dan mengurangi kesenjangan pendapatan secara lebih efektif.

4. Implikasi Kebijakan Upah Minimum Provinsi

Upah Minimum Provinsi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Sumatera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan UMP cenderung mengurangi ketimpangan pendapatan, dengan alasan bahwa adanya standar upah yang lebih tinggi memberikan perlindungan bagi pekerja, terutama di sektor informal, untuk mendapatkan pendapatan yang lebih layak. Ketika UMP ditetapkan lebih tinggi, maka pendapatan masyarakat dengan pekerjaan yang kurang terampil atau bekerja di sektor informal juga meningkat, sehingga mengurangi kesenjangan antara kelompok dengan pendapatan tinggi dan rendah. Hal ini terjadi karena UMP yang lebih tinggi memungkinkan distribusi pendapatan yang lebih merata di antara pekerja, mengurangi ketimpangan yang

biasanya terjadi antara sektor formal dan informal serta antara daerah kaya dan miskin.

Sebagai rekomendasi kebijakan, pemerintah perlu meninjau dan menaikkan UMP secara berkala berdasarkan kebutuhan hidup layak di setiap daerah. Peningkatan UMP harus disertai dengan kebijakan yang mendukung peningkatan produktivitas dan pendidikan keterampilan bagi tenaga kerja agar mereka dapat mengakses pekerjaan yang lebih baik dan lebih produktif.

Program seperti Program Kartu Prakerja yang memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat yang kurang terampil harus diperluas untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. Selain itu, implementasi kebijakan seperti Kebijakan Pengupahan Minimum yang sudah diterapkan di beberapa provinsi, dan Program Subsidi Upah yang diberikan kepada perusahaan untuk menjaga kelangsungan usaha dan perlindungan bagi pekerja di tengah situasi ekonomi sulit, bisa lebih dioptimalkan untuk mendukung pengurangan ketimpangan pendapatan.